

ABSTRAK

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sebagai upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagai program yang didanai melalui keuangan negara, pelaksanaan MBG harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, keterlibatan berbagai lembaga pemerintah dan pihak ketiga dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab hukum serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan atau kerugian negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan Program Makanan Bergizi Gratis dalam sistem pengelolaan keuangan negara serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas penggunaan keuangan negara dalam program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis merupakan bagian dari kebijakan publik yang wajib dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Namun, masih terdapat kelemahan pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab hukum dan mekanisme pengawasan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Makanan Bergizi Gratis, Keuangan Negara, Akuntabilitas, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Makanan Bergizi Gratis/MBG) is a government policy aimed at improving the nutritional quality of society, particularly children and vulnerable groups, as part of efforts to support human resource development and promote social welfare. As a program financed through state funds, its implementation must adhere to the principles of accountability, transparency, and legal certainty. However, the involvement of various government institutions and third parties in its implementation raises issues regarding the distribution of legal responsibilities and accountability mechanisms in cases of irregularities or state financial losses.

This study aims to analyze the regulation of financial management within the Free Nutritious Meal Program under the state financial management system and to examine the forms of legal accountability for the use of state finances in the program. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources analyzed through descriptive qualitative methods.

The findings indicate that the Free Nutritious Meal Program is a public policy that must be managed in accordance with the principles of sound state financial governance. Nevertheless, weaknesses remain in the regulatory framework governing the allocation of legal responsibility and supervisory mechanisms, which may lead to legal uncertainty. Therefore, strengthening the legal framework is necessary to ensure accountability and legal certainty in the implementation of the program.

Keywords: Legal Accountability, Free Nutritious Meal Program, State Finance, Accountability, Legal Certainty.